

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

A photograph of a person paragliding over a landscape, with a large red arrow graphic pointing upwards from the bottom left corner. The background shows a blue sky with clouds and a valley below.

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA) TAHUN 2023**



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbang menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Renja Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
- i. Renja Dinas Kesehatan;
- j. Renja Dinas Sosial;
- k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- l. Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan;
- p. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- q. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- r. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Renja Dinas Pekerjaan Umum;
- t. Renja Dinas Perhubungan;
- u. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- w. Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan;
- x. Renja Dinas Kearsipan;
- y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
- aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Renja Kecamatan Wonogiri;
- dd. Renja Kecamatan Selogiri;
- ee. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
- ff. Renja Kecamatan Ngadirojo;
- gg. Renja Kecamatan Wuryantoro;
- hh. Renja Kecamatan Manyaran;
- ii. Renja Kecamatan Baturetno;
- jj. Renja Kecamatan Giriwoyo;
- kk. Renja Kecamatan Jatisrono;
- ll. Renja Kecamatan Jatiroto;
- mm. Renja Kecamatan Eromoko;
- nn. Renja Kecamatan Pracimantoro;
- oo. Renja Kecamatan Purwantoro;
- pp. Renja Kecamatan Kismantoro;
- qq. Renja Kecamatan Batuwarno;
- rr. Renja Kecamatan Karangtengah;
- ss. Renja Kecamatan Giritontro;
- tt. Renja Kecamatan Paranggupito;

- uu. Renja Kecamatan Jatipurno;
- vv. Renja Kecamatan Slogohimo;
- ww. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
- xx. Renja Kecamatan Sidoharjo;
- yy. Renja Kecamatan Girimarto;
- zz. Renja Kecamatan Bulukerto;
- aaa. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI WONOGIRI,


JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,


HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 31



LAMPIRAN F :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG :
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: *failing to plan is planning to fail*; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

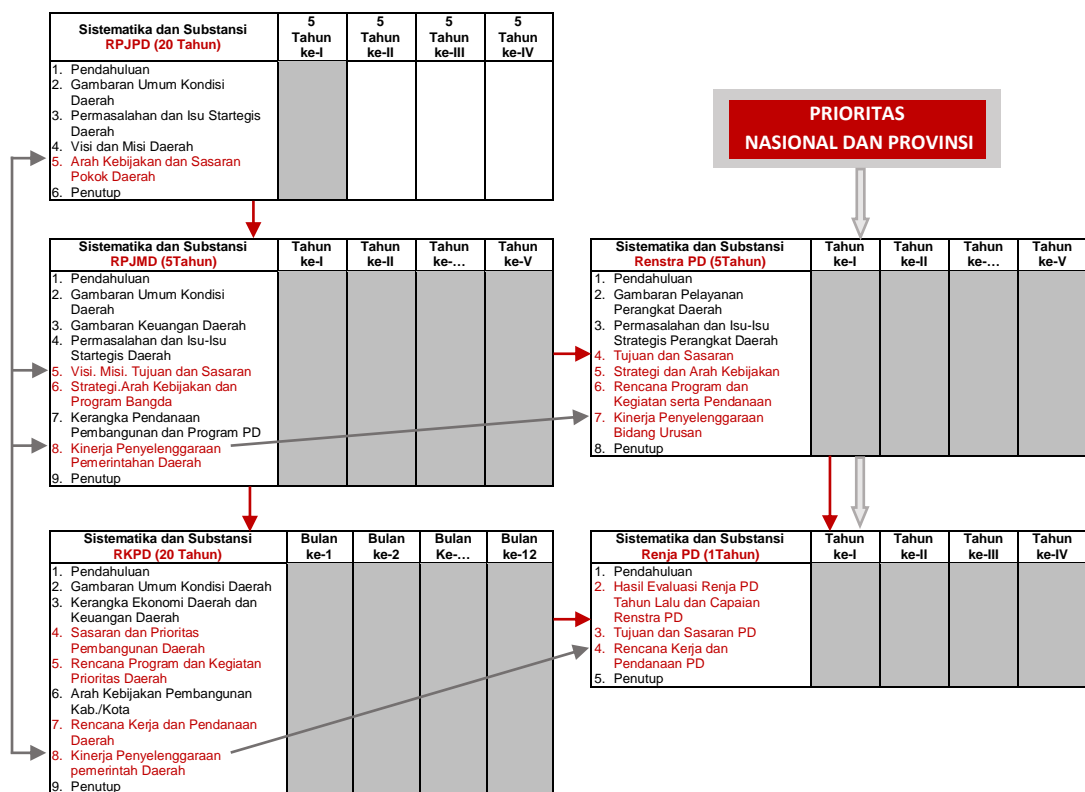
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang

menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja BPKD (Renja BPKD) adalah dokumen perencanaan kinerja BPKD untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKD untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



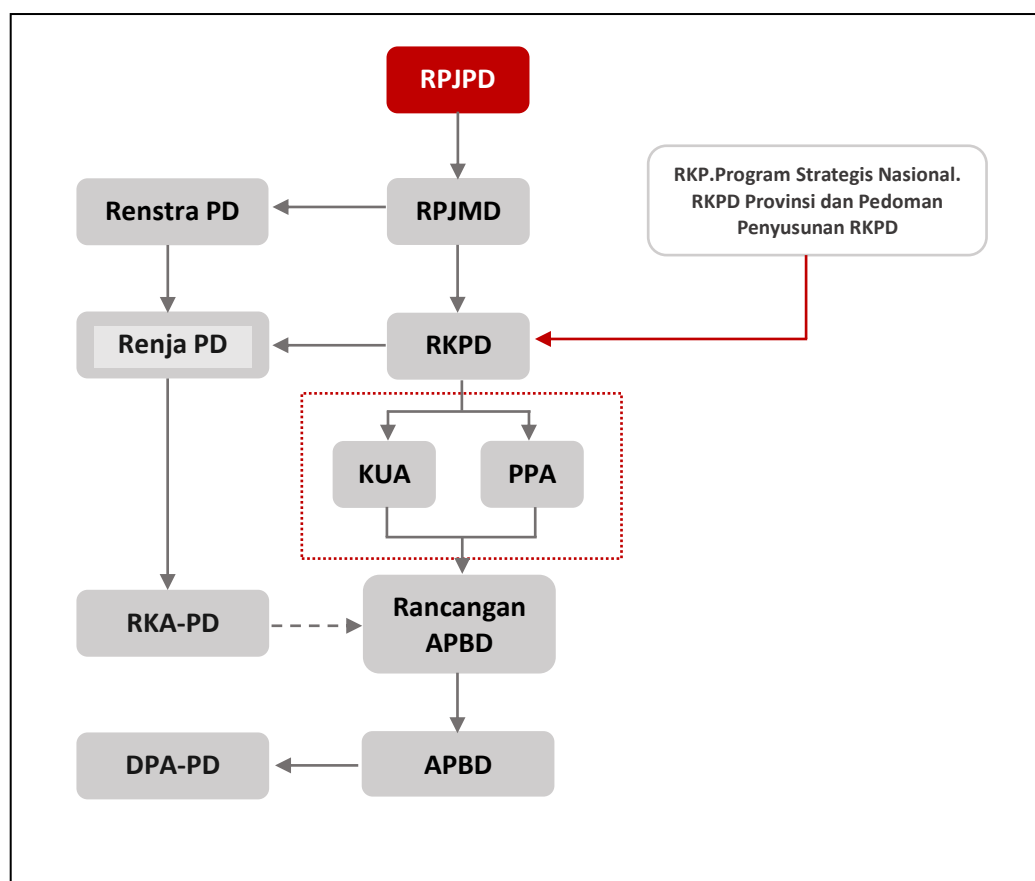
Renja BPKD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Tahapan penyusunan Renja BPKD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja BPKD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja BPKD berpedoman pada Renstra BPKD, evaluasi hasil Renja BPKD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja BPKD tahun berjalan;

3. Penyusunan Rancangan Renja BPKD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rancangan Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja BPKD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja BPKD berdasarkan Perkada tentang RKPD; Verifikasi Rancangan Akhir Renja BPKD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja BPKD Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 – 2026.
 25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 disusun guna memberikan pedoman dan arahan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri di Tahun 2023 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta kerangka anggarannya untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra BPKD dan RPJMD Kabupaten Wonogiri di Tahun 2023.
- b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Kinerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH (PD)

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaan Renja serta program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra PD dan RPJMD.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sudah melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sesuai dengan RENJA BPKD Tahun 2021. Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut untuk mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan pada RENSTRA BPKD 2021-2026. Secara umum tingkat realisasi RENJA terhadap target mencapai 100%. Ada 2 (dua) Kegiatan yang pada Tahun 2021 realisasinya 0%, karena Kegiatan tersebut baru ada pada Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan RENJA BPKD Tahun 2021 dan capaian RENSTRA BPKD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1.a dan Tabel 2.1.b.

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-3)
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 02	KEUANGAN									
4 02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	-	95%	-	-	-	-	-	-
4 02 01 01 020	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non PNS	-	32 orang	-	-	-	-	-	-
4 02 01 01 022	Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pembayaran Penerangan Jalan Umum	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 02 01 01 029	Penyediaan Langgananan/Jasa Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Perkantoran	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 02 01 01 030	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan untuk menunjang Pelayanan dan Operasional OPD	-	90%	-	-	-	-	-	-
4 02 01 02	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya Sarana	-	90%	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	dan Prasarana Pendukung Kinerja Aparatur								
4 02 01 02 067	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	10 jenis	-	-	-	-	-	-
4 02 01 02 068	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Alat listrik yang tersedia selama satu tahun	-	3 jenis	-	-	-	-	-	-
4 02 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	0	-	-	-	-	-	-
4 02 01 05 019	Peningkatan SDM	Jumlah Pegawai yang mengikuti Penyelenggaraan Peningkatan SDM	-	0	-	-	-	-	-	-
4 02 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	-	16 Dokumen	-	-	-	-	-	-
4 02 01 06 028	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi yang tersusun	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 02 01 06 029	Peningkatan Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	-	6 dokumen	-	-	-	-	-	-
4 02 01 17	PROGRAM PENINGKATAN	Terlaksananya	-	90%	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan DAERAH											
4	02	01	17	020	Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Kebijakan tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan	-	2 dokumen	-	-	-	-	-
4	02	01	17	021	Kegiatan MPT-GR	Persentase Terelesaikannya Kasus yang Ditangani	-	100%	-	-	-	-	-
4	02	01	17	040	Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Keuangan yang tersusun	-	2 dokumen	-	-	-	-	-
4	02	01	17	071	Penyusunan APBD	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	-	20 dokumen	-	-	-	-	-
4	02	01	17	072	Validasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RKA dan DPA	-	4 kali	-	-	-	-	-
4	02	01	17	073	Pengelolaan dan Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Penerbitan SP2D tertib dan lancar sesuai Ketentuan	-	8.548 dokumen	-	-	-	-	-
4	02	01	17	074	Pengelolaan Kas Daerah	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Daerah	-	354 dokumen	-	-	-	-	-
4	02	01	17	075	Pengelolaan Gaji ASN	Cetak Daftar Gaji dan Pelaporan Gaji ASN	-	14 kali	-	-	-	-	-
4	02	01	17	076	Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen	-	2 dokumen	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah											
4	02	01	17	077	Peningkatan Manajemen Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang dapat menyusun laporan secara mandiri dengan menggunakan sistem aplikasi	-	75%	-	-	-	-	-	-
4	02	01	17	078	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	-	85%	-	-	-	-	-	-
4	02	01	30		PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah	-	10%	-	-	-	-	-	-
4	02	01	30	003	Penyediaan sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB	Penyediaan blanko-blanko dokumen PBB dan BPHTB	-	545.500 Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-
4	02	01	30	008	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	5.136 Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-
4	02	01	30	010	Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah	Update data Wajib Pajak	-	543.913 Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 02 01 30 012	Hadiah Pelunasan PBB	Jumlah Kursi Hadiah Pelunasan PBB	-	0	-	-	-	-	-	-
4 02 01 30 015	Intensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	-	543.698 Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-
4 02 01 30 016	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah yang Terpelihara	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
4 02 01 28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	90%	-	-	-	-	-	-
4 02 01 28 008	Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten	Jumlah buku Pedoman Standarisasi indeks Belanja Kabupaten yang disusun	-	425 buku	-	-	-	-	-	-
4 02 01 28 013	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Jumlah Barang yang masih dimanfaatkan	-	49 OPD	-	-	-	-	-	-
4 02 01 28 020	Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah	Terlaksannya Pengamanan dan Penertiban Aset-Aset Pemerintah Kabupaten	-	90%	-	-	-	-	-	-
4 02 01 28 045	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	53 OPD	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1.b.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN									
4 02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	%	0	100	100	100	100%	-	-
4 02 01 01 020	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non PNS	32	32	32	32	100	32 orang	-	-
4 02 01 01 022	Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pembayaran Penerangan Jalan Umum	12	12	12	12	100	12 bulan	-	-
4 02 01 01 029	Penyediaan Langganan/Jasa Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Perkantoran	12	12	12	12	100	12 bulan	-	-
4 02 01 01 030	Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan untuk menunjang Pelayanan dan Operasional OPD	12	90%	12	12	100	12 bulan	-	-
4 02 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana							-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	APARATUR	Pendukung Kinerja Aparatur												
4	02	01	02	067	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	40	10	44	44	100	40 unit	-	-
4	02	01	02	068	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Alat listrik yang tersedia selama satu tahun	0	3	0	0	0	0	-	-
4	02	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur							-	-
4	02	01	05	019	Peningkatan SDM	Jumlah Pegawai yang mengikuti Penyelenggaraan Peningkatan SDM	0	3	0	0	0	0	-	-
4	02	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan							-	-
4	02	01	06	028	Peningkatan Kinerja Perencanaan, Pelaporan dan Monitoring Evaluasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi yang tersusun	10	10	2	2	100	9 dokumen	-	-
4	02	01	06	029	Peningkatan Kinerja Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	14	6	5	5	100	14 Laporan	-	-
4	02	01	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya Penyusunan Laporan							-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kinerja dan Keuangan												
4	02	01	17	020	Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	Kebijakan tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan	0	2	0	0	0	-	-	
4	02	01	17	021	Kegiatan MPT-GR	Persentase Terelesaikannya Kasus yang Ditangani	100	100	100	100	100%	-	-	
4	02	01	17	040	Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Keuangan yang tersusun	2	2	2	2	100	2 dokumen	-	-
4	02	01	17	071	Penyusunan APBD	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	10	20	10	10	100	10 dokumen	-	-
4	02	01	17	072	Validasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Pelaksanaan Verifikasi Dokumen RKA dan DPA	53	4	53	53	100	53 OPD	-	-
4	02	01	17	073	Pengelolaan dan Pelayanan Perbendaharaan Daerah	Penerbitan SP2D tertib dan lancar sesuai Ketentuan	90	85	100	95	95	86%	-	-
4	02	01	17	074	Pengelolaan Kas Daerah	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Daerah	300	330	300	300	100	300 Laporan	-	-
4	02	01	17	075	Pengelolaan Gaji ASN	Cetak Daftar Gaji dan Pelaporan Gaji ASN	14	14	14	14	100	14 Kali	-	-
4	02	01	17	076	Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	100	2 dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Pertanggungjawaban Keuangan Daerah		tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah										
4	02	01	17	077	Peningkatan Manajemen Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang dapat menyusun laporan secara mandiri dengan menggunakan sistem aplikasi	80	75	80	80	100	80%	-	-
4	02	01	17	078	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku	0	85	0	0	0	0	-	-
4	02	01	30		PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah							-	-
4	02	01	30	003	Penyediaan sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB	Penyediaan blanko-blanku dokumen PBB dan BPHTB	546.400	543.000	543.500	550.000	101	546.400 dokumen	-	-
4	02	01	30	008	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	13.963	1.850	1.850	1.996	108	13.563 wajib pajak	-	-
4	02	01	30	010	Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah	Update data Wajib Pajak	543.525	543.150	543.150	543.266	100	543.150 objek pajak	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th. 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Th. 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun berjalan(n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 02 01 30 012	Hadiah Pelunasan PBB	Jumlah Kursi Hadiah Pelunasan PBB	0	2500	0	0	0	0	-	-
4 02 01 30 015	Intensifikasi Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah	552.500	560.000	552.500	545.954	98	552.500 WP	-	-
4 02 01 30 016	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah yang Terpelihara	12	12	12	12	100	12 bulan	-	-
4 02 01 28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah							-	-
4 02 01 28 008	Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten	Jumlah buku Pedoman Standarisasi indeks Belanja Kabupaten yang disusun	480	480	480	425	88	480 buku	-	-
4 02 01 28 013	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Jumlah Barang yang masih dimanfaatkan	1010	53	1010	1010	100	1010 UPB	-	-
4 02 01 28 020	Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah	Terlaksannya Pengamanan dan Penertiban Aset-Aset Pemerintah Kabupaten	810	90	810	754	93	810 UPB	-	-
4 02 01 28 045	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	53	53	53	53	100	53 OPD	-	-

Capaian terhadap Sasaran pada BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, yaitu:

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Meningkatnya Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Sasaran pertama dan kedua memiliki target dan realisasi yang sama, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2. Untuk Sasaran ketiga, capaiannya digambarkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2.
Pencapaian Sasaran Pertama dan Kedua pada BPKD Wonogiri Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
Opini BPK	Opini	2016	WTP	WTP	100
		2017	WTP	WTP	100
		2018	WTP	WTP	100
		2019	WTP	WTP	100
		2020	WTP	WTP	100
		2021	WTP	WTP	100

Tabel 2.3.
Pencapaian Sasaran Ketiga pada BPKD Wonogiri Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	2016	9.00	10.75	119.34
		2017	9.50	14.36	151.00
		2018	9.75	11.93	122.36
		2019	10.00	11.71	117.10
		2020	10.50	12.09	115.14
		2021	11.00	10.47	95.18%

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki; dan
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Tahun 2021 Alokasi anggaran yang diterima oleh BPKD Kabupaten Wonogiri sesuai dengan DPPA Tahun 2021 sebesar Rp. 430.159.088.423 dari keseluruhan kegiatan terdiri dari 4 program dan 11 kegiatan dan 48 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp 420.720.712.939 dengan tingkat capaian sebesar 97.81%. Adapun hasil masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 digambarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Tabel Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kegiatan
BPKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEUANGAN						430.159.088.423	420.720.712.939	97.81%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan pelayanan dan ketepatan pelaporan	%	100			31.772.065.964	26.919.708.553	84.73%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	3	3	100	74.820.880	70.243.827	93.88%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	2	100	14.997.308	13.008.258	86.74%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1	100	59.823.572	57.235.569	95.67%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	Dokumen	6	6	100	15.401.983.082	11.128.203.583	72.25%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Jenis	10	10	100	15.244.486.238	10.974.800.833	71.99%
		Insentif Retribusi Daerah	Jenis	1	1	100			
		Jenis Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	Jenis	11	11	100			
		Jumlah ASN	Orang	80	80	100			
		Jumlah ASN yang menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	Orang	80	80	100			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	5	5	100	152.498.464	148.594.250	97.44%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1	100	4.998.380	4.808.500	96.20%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	755.432.322	713.169.433	94.41%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	9	75	14.997.410	14.577.600	97.20%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	9	75	535.582.241	520.846.050	97.25%
			Jenis	2	2	100			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian	Bulan	12	12	100	34.331.808	34.321.400	99.97%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	9	75	70.759.284	68.138.000	96.30%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	n Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman kunjungan tamu	Bulan	12	12	100	38.230.000	19.150.000	50.09%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	12	100	61.531.579	56.136.383	91.23%
1.4	Penyediaan Jasa	Tertib Administrasi	Bulan	12	12	100	15.148.850.380	14.629.143.225	96.57%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Perkantoran							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya tagihan jasa surat-menyurat	Bulan	12	12	100	100.400.000	99.860.100	99.46%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	100	14.292.000.000	13.905.375.849	97.29%
		Terbayarnya Tagihan Pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum (PPJU)	Bulan	12	12	100			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa untuk pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	6	6	100	43.993.573	39.752.676	90.36%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non ASN	Orang	32	32	100	712.456.807	584.154.600	81.99%
		Tersedianya Jasa Kebersihan dan Bahan Pembesih	Bulan	12	12	100			
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Administrasi Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	12	100	390.979.300	378.948.485	96.92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/	Unit	44	44	100	154.818.936	150.073.935	96.94%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional							
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	44	44	100			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Lokasi	3	3	100	35.481.600	35.453.050	99.92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor dan Alat Rumah Tangga yang terpelihara	Jenis	10	10	100	200.678.764	193.421.500	96.38%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	%	80			396.323.564.398	391.796.743.116	98.86%
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Rancangan Perda serta PerKDH dan Rancangan PerKDH yang tersusun	Dokumen	20	20	100	851.305.815	731.285.005	85.90%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terselenggaranya Penyusunan KUA PPAS	OPD	53	53	100	44.451.996	36.791.000	82.77%
	Koordinasi, Penyusunan	Verifikasi RKA SKPD	OPD	53	53	100	14.808.040	13.454.000	90.86%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Verifikasi RKA-SKPD	Se-Kab, Wonogiri							
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Verifikasi Perubahan RKA SKPD Se-Kab, Wonogiri	OPD	53	53	100	37.114.193	34.052.000	91.75%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA SKPD yang di Verifikasi dan Disahkan	OPD	53	53	100	20.779.354	20.283.550	97.61%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi dan Disahkan	OPD	53	53	100	50.263.430	27.955.800	55.62%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan PerKDH Penjabaran APBD	Dokumen	10	10	100	349.999.512	334.005.855	95.43%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda P APBD dan PerKDH Penjabaran P APBD	Dokumen	10	10	100	324.999.444	260.205.300	80.06%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Bidang Anggaran	Dokumen	3	3	100	8.889.846	4.537.500	51.04%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Pelaporan Bidang Perbendaharaan, Pelaporan Posisi Kas Daerah, dan Laporan Dana Transfer/ Perimbangan	Bulan	12	12	100	324.997.920	292.922.910	90.13%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Daerah	Dokumen	300	320	106.67	99.999.448	90.553.582	90.55%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Dana Transfer	%	100	95	95	49.999.372	47.542.250	95.09%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Daftar Gaji dan Pelaporan Gaji ASN	Kali	14	14	100	49.999.440	44.589.500	89.18%
	Rekonsiliasi Data	Jumlah Dokumen	Dokumen	8000	10.144	126.8	124.999.660	110.237.578	88.19%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	SP2D yang diterbitkan tertib dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku							
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPD	53	53	100	581.748.858	574.068.321	98.68%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang dapat menyusun laporan secara mandiri dengan menggunakan sistem aplikasi	%	80	80	100	204.372.002	203.930.000	99.78%
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Kegiatan	5	5	100			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	100	281.604.356	279.110.821	99.11%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	%	100	100	100	14.500.000	9.900.000	68.28%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Sinkronisasi Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen	2	2	100	81.272.500	81.127.500	99.82%
		Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Kali	8	6	75			
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	80	80	100	394.565.511.805	390.198.466.880	98.89%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tertib Administrasi Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Penyaluran Dana Subsidi	Lembaga	2	2	100	50.000.000	960.000	1.92%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Keuangan	%	100	100	100	360.130.850.500	360.130.850.500	100.00 %
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Tertib Administrasi Penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga	%	100	100	100	27.155.263.305	23.287.474.380	85.76%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Penyaluran Dana Bagi Hasil	Desa	251	251	100	7.229.398.000	6.779.182.000	93.77%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	%	80			809.999.481	766.961.000	94.69%
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pembinaan dan Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	UPB	1010	1010	100	809.999.481	766.961.000	94.69%
	Penyusunan Standar	Jumlah Buku	Buku	480	425	89	142.500.000	135.737.000	95.25%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Harga	Pedoman Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten yang disusun							
		Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja	Dokumen	2	2	100			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap	UPB	1010	1010	100	447.499.652	414.960.000	92.73%
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	OPD	53	53	100			
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (UPB dan Pihak Lain)	UPB	810	754	93.09	200.000.000	196.819.500	98.41%
		Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban Aset-Aset Pemerintah Kabupaten	%	90	90	100			
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	53	53	100	19.999.829	19.444.500	97.22%

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	11.00			1.253.458.580	1.237.300.270	98.71%
4.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laporan	12	12	100	1.253.458.580	1.237.300.270	98.71%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	%	11	10.47	95.18			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak	Wajib Pajak	552.000	545.954	98.90	891.837.750	891.837.750	100.00 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Blanko-blanko Dokumen PBB dan BPHTB	Dokumen	543.500	550.000	101	197.474.634	191.621.438	97.04%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Update Data Wajib Pajak	Wajib Pajak	543.150	543.266	100.02	12.780.400	12.765.807	99.89%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak	1.850	1996	108	32.488.824	31.810.000	97.91%
		Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Wajib Retribusi	66	66	100			

No,	Kegiatan	Capaian Kinerja Output					Realisasi Anggaran		
		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Periode Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	Bulan	12	12	100	89.988.000	88.646.750	98.51%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	Bulan	12	12	100	28.888.972	20.618.525	71.37%
		Persentas Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	%	100	95.06	95.06			

(Unaudited)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri diukur berdasarkan evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut telah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 2 tujuan dengan masing-masing diwakili oleh 1 sasaran. Kemudian sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam indikator-indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja. Adapun target, realisasi serta proyeksi dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat secara lengkap pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangann Daerah
Kabupaten Wonogiri

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset			85%	86%	87%	88%	N/A	86%	87%	88%	
		Optimalisasi inventarisasi nilai asset daerah			N/A	90%	90%	90%	N/A	90%	90%	90%	
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah			11.00%	12.25%	12.50%	12.65%	10.47%	17.63%	12.50%	12.65%	
1.1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase ketertiban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah			N/A	100%	100%	100%	N/A	25%	100%	100%	
		Persentase ketertiban pengelolaan asset pemerintahan daerah			N/A	86%	87%	88%	N/A	100%	87%	88%	
		Persentase ketertiban pengelolaan pendapatan pemerintahan daerah			N/A	85%	85%	85%	N/A	33.8%	85%	85%	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja BPKD	Nilai Kematangan Organisasi			45	45	45	45	N/A	-	45	45	
2.2.	Meningkatnya Kinerja BPKD	Nilai SAKIP			75.50	76.50	77.50	78.50	75.83	78.37%	77.50	78.50	
		Jumlah Agen Perubahan			N/A	1	2	3	N/A	1	2	3	
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			70.00	76.00	81.00	82.00	60.77	68.77	81.00	82.00	
		IKM Perangkat Daerah			82.00	82.00	82.00	82.00	78.99	78.37	82.00	82.00	
		Jumlah Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dibidang keuangan diantaranya yaitu:

1. Potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang terbatas;
2. Belum terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efisien, transparan dan akuntabel;
3. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih rendah;
4. Tekanan fiskal akibat Pandemi COVID-19.

Kemudian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berlandaskan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri bertugas menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.

Selaras dengan permasalahan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2021-2026. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1. Perubahan Regulasi yang berubah dengan cepat dan dinamis;
2. Implementasi penyusunan Laporan Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang belum optimal;
5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, baik dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Wonogiri maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;

6. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, sampai pada pelaporan kinerja;
7. Implementasi dari regulasi yang mengamankan transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-tunai;
8. Pendataan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah belum maksimal;
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal;
10. Tidak adanya celah fiskal dalam pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah daerah;
11. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan beban kerja dan sarana dan prasarana yang tersedia.

Tabel 2.6.
Permasalahan yang dihadapi BPKD Kab. Wonogiri

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efisien, transparan dan akuntabel	Perubahan regulasi yang berubah dengan cepat dan dinamis	Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal karena harus diimplementasikan mengikuti perubahan regulasi yang cepat dan dinamis
		Implementasi penyusunan Laporan Akuntansi Berbasis Akrua	Pengelola keuangan pada perangkat daerah masih belum sepenuhnya memahami penerapan akuntansi berbasis akrua
		Kecepatan dan ketetapan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah	SDM pada perangkat daerah masih belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam juklak/ juknis penatausahaan keuangan yang berlaku
		Kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang belum optimal	Kurangnya pemahaman OPD dalam pengelolaan barang milik daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan dan asset daerah, baik dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Pusat, dan perbedaan platform pada sistem informasi yang akan diintegrasikan
		Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, sampai pada pelaporan kinerja	Banyaknya tuntutan laporan yang harus disajikan dengan format berbeda integrasi sistem informasi yang ada belum optimal
		Implementasi dari regulasi yang mengamankan transaksi daerah menggunakan pola transaksi non tunai	Selain budaya sosial masyarakat yang belum terbiasa menggunakan transaksi non tunai, masih ada beberapa rekening belanja dan rekening pendapatan yang belum bisa menggunakan pola transaksi non tunai
2.	Potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah yang terbatas	Pendataan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah belum maksimal	Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah belum optimal Belum maksimalnya penggunaan transaksi elektronik untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah
3.	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih rendah	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah belum optimal	Regulasi tentang pajak dan retribusi yang perlu diperbarui Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19	Tidak adanya celah fiskal dalam pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah daerah	Kebutuhan belanja daerah cenderung naik tetapi penerimaan daerah baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah menurun

2.4. Review Rancangan Terhadap RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kinerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN				442.706.808.571		442.776.808.571				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah			31.773.073.675	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah			31.813.073.675	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			15.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			25.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	BPKD	9 Dok.	10.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	BPKD	9 Dok.	20.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	BPKD	1 Dok.	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	BPKD	1 Dok.	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tepat waktu				kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tepat waktu				
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun			16.279.426.834	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun			16.279.426.834	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	26 Dok.	16.274.426.834	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	Kab, Wonogiri	26 Dok.	16.274.426.834	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan dan Semesteran	BPKD	14 Lap.	2.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan dan Semesteran	BPKD	14 Lap.	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun	BPKD	5 Lap.	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun	BPKD	5 Lap.	2.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian			25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian			25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN di Lingkungan BPKD yang Mengikuti Diklat/ Pelatihan	BPKD	5 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN di Lingkungan BPKD yang Mengikuti Diklat/ Pelatihan	BPKD	5 Orang	25.000.000	
	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah			610.829.405	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah			640.829.405	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Alat listrik yang tersedia	BPKD	12 Jenis	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Alat listrik yang tersedia	BPKD	12 Jenis	12.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	selama satu tahun				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	selama satu tahun				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKD	3 Jenis	395.329.405	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKD	3 Jenis	395.329.405	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan	BPKD	4 Jenis	41.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik yang disediakan	BPKD	4 Jenis	41.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	BPKD	12 Jenis	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun	BPKD	12 Jenis	100.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu yang terfasilitasi selama 1 tahun	BPKD	12 Kali	17.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu yang terfasilitasi selama 1 tahun	BPKD	12 Kali	17.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	BPKD	20 Kali	70.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun	BPKD	20 Kali	70.000.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen arsip yang terkelola	BPKD	12 Dok.	5.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen arsip yang terkelola	BPKD	12 Dok.	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah			50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah			50.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis belanja modal peralatan gedung kantor	BPKD	2 Jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis belanja modal peralatan gedung kantor	BPKD	2 Jenis	50.000.000	
	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			14.492.817.436	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			14.492.817.436	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengajuan pembayaran tagihan surat menyurat selama 1 tahun	BPKD	12 Kali	160.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengajuan pembayaran tagihan surat menyurat selama 1 tahun	BPKD	12 Kali	160.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)	BPKD	12 Kali	13.612.417.436	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran langganan (telepon, listrik, air dan internet)	BPKD	12 Kali	13.612.417.436	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non ASN yang mendapat honorarium per bulan	BPKD	32 Orang	720.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah non ASN yang mendapat honorarium per bulan	BPKD	32 Orang	720.000.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			300.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			300.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas yang	BPKD	40 Unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas yang	BPKD	40 Unit	115.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpelihara dalam satu tahun				Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpelihara dalam satu tahun				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	BPKD	10 Jenis	170.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	BPKD	10 Jenis	170.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	BPKD	3 Unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	BPKD	3 Unit	15.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah			408.714.234.896	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah			408.714.234.896	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu			810.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu			810.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS	Kab. Wonogiri	2 Dok.	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS	Kab, Wonogiri	2 Dok.	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	Kab. Wonogiri	2 Dok.	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	Kab, Wonogiri	2 Dok.	50.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PPAS	PPAS				dan Perubahan PPAS	PPAS				
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Persentase Dokumen RKA OPD yang diverifikasi tepat waktu	Kab. Wonogiri	100 Persen	25.000.000	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Persentase Dokumen RKA OPD yang diverifikasi tepat waktu	Kab, Wonogiri	100 Persen	25.000.000	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase Dokumen perubahan RKA OPD yang diverifikasi tepat waktu	Kab. Wonogiri	100 Persen	30.000.000	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen perubahan RKA OPD yang diverifikasi tepat waktu	Kab, Wonogiri	100 Persen	30.000.000	
	Kordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA-OPD yang diverifikasi dan disahkan tepat waktu	Kab. Wonogiri	100 Persen	25.000.000	Kordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA-OPD yang diverifikasi dan disahkan tepat waktu	Kab, Wonogiri	100 Persen	25.000.000	
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPPA-OPD yang diverifikasi dan disahkan tepat waktu	Kab. Wonogiri	100 Persen	30.000.000	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase DPPA-OPD yang diverifikasi dan disahkan tepat waktu	Kab, Wonogiri	100 Persen	30.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan PerKDH Penjabaran APBD yang disusun	Kab. Wonogiri	10 Dokumen	300.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan PerKDH Penjabaran APBD yang disusun	Kab, Wonogiri	10 Dokumen	300.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan	Jumlah Dokumen Perda Perubahan	Kab. Wonogiri	10 Dok.	300.000.000	Koordinasi dan penyusunan	Jumlah Dokumen Perda Perubahan	Kab, Wonogiri	10 Dok.	300.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD dan PerKDH Penjabaran Perubahan APBD yang disusun				Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD dan PerKDH Penjabaran Perubahan APBD yang disusun				
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi			335.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi			335.000.000	
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Laporan rekonsiliasi kas daerah	Kab. Wonogiri	300 Lap.	75.000.000	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Laporan rekonsiliasi kas daerah	Kab, Wonogiri	300 Lap.	75.000.000	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah pelaksanaan penerbitan SPD	Kab. Wonogiri	4 Kali	10.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah pelaksanaan penerbitan SPD	Kab, Wonogiri	4 Kali	10.000.000	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase realisasi penyerapan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Wonogiri	87 Persen	50.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Persentase realisasi penyerapan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab, Wonogiri	87 Persen	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lainnya					
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Rekonsiliasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Kab. Wonogiri	4 Lap.	15.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Rekonsiliasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Kab, Wonogiri	4 Lap.	15.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan tentang gaji/ tambahan penghasilan pegawai per bulan dan laporan rekonsiliasi yang disusun	Kab. Wonogiri	22 Lap.	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan tentang gaji/ tambahan penghasilan pegawai per bulan dan laporan rekonsiliasi yang disusun	Kab, Wonogiri	22 Lap.	50.000.000	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase terselesaikannya penerbitan SP2D	Kab. Wonogiri	100 Persen	115.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase terselesaikannya penerbitan SP2D	Kab, Wonogiri	100 Persen	115.000.000	
	Penyusunan Petunjuk	Jumlah dokumen	Kab.	1 Dok.	20.000.000	Penyusunan	Jumlah dokumen	Kab,	1 Dok.	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	petunjuk teknis yang disusun	Wonogiri			Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	petunjuk teknis yang disusun	Wonogiri			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP			625.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP			625.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan yang dikonsolidasikan	Kab. Wonogiri	4 Lap.	250.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan yang dikonsolidasikan	Kab, Wonogiri	4 Lap.	250.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	275.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Kab, Wonogiri	2 Dok.	275.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan penyelesaian TP TGR	Kab. Wonogiri	1 Dok.	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan penyelesaian TP TGR	Kab, Wonogiri	1 Dok.	10.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi yang disusun	Kab. Wonogiri	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi yang disusun	Kab, Wonogiri	1 Dok.	20.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan	Kab. Wonogiri	8 Keg.	70.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pendampingan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan	Kab, Wonogiri	8 Keg.	70.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan			406.844.234.896	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan			406.844.234.896	
	Analisis Perencanaan	Jumlah Penerima	Kab.	251	387.293.652.332	Analisis	Jumlah Penerima	Kab,	251	387.293.652.332	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan Penyaluran Bantuan Keuangan	yang mendapatkan alokasi bantuan	Wonogiri	Alokasi		Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	yang mendapatkan alokasi bantuan	Wonogiri	Alokasi		
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tingkat kesesuaian realisasi belanja tidak terduga dengan ketentuan	Kab. Wonogiri	100 Persen	10.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tingkat kesesuaian realisasi belanja tidak terduga dengan ketentuan	Kab, Wonogiri	100 Persen	10.000.000.000	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil	Kab. Wonogiri	251 Alokasi	9.550.582.564	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima yang mendapatkan alokasi dana bagi hasil	Kab, Wonogiri	251 Alokasi	9.550.582.564	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time			100.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time			100.000.000	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	Kab. Wonogiri	100 Persen	100.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan dalam implementasi Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	Kab, Wonogiri	100 Persen	100.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah			1.024.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah			1.024.500.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah			1.024.500.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah			1.024.500.000	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	67.500.000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang disusun	Kab, Wonogiri	2 Dok.	67.500.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun	Kab, Wonogiri	2 Dok.	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Kab. Wonogiri	2 Dok.	400.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Kab, Wonogiri	2 Dok.	400.000.000	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	1 Keg.	300.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah	Kab, Wonogiri	1 Keg.	300.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Kepemilikan Barang Milik Daerah yang Terpasang	Kab. Wonogiri	301 Buah	200.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Kepemilikan Barang Milik Daerah yang Terpasang	Kab, Wonogiri	301 Buah	200.000.000	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah yang akan Dijual/Dilelang	Kab. Wonogiri	3 Keg.	10.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah yang akan Dijual/Dilelang	Kab, Wonogiri	3 Keg.	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang dilaksanakan	Kab. Wonogiri	2 Keg.	10.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang dilaksanakan	Kab, Wonogiri	2 Keg.	10.000.000	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diproses Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Kab. Wonogiri	2020 Unit	5.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diproses Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Kab, Wonogiri	2020 Unit	5.000.000	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	2 Keg.	7.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	Kab, Wonogiri	2 Keg.	7.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase UPB yang tertib melaporkan mutasi barang milik daerah tepat waktu	Kab. Wonogiri	100 Persen	20.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase UPB yang tertib melaporkan mutasi barang milik daerah tepat waktu	Kab, Wonogiri	100 Persen	20.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah			1.195.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah			1.225.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah			1.195.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah			1.225.000.000	

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis kebijakan pajak daerah yang disosialisasikan	Kab. Wonogiri	2 Kebijakan	850.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis kebijakan pajak daerah yang disosialisasikan	Kab, Wonogiri	2 Kebijakan	850.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SPPT dan SSPD yang terdistribusikan kepada Wajib Pajak	Kab. Wonogiri	546400 Dok.	175.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SPPT dan SSPD yang terdistribusikan kepada Wajib Pajak	Kab, Wonogiri	546400 Dok.	175.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	543250 Objek Pajak	20.000.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah	Kab, Wonogiri	543250 Objek Pajak	50.000.000	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD dan SKRD yang diterbitkan	Kab. Wonogiri	13663 Dok.	30.000.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen SKPD dan SKRD yang diterbitkan	Kab, Wonogiri	13663 Dok.	30.000.000	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang disusun	Kab. Wonogiri	8 Lap.	90.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang disusun	Kab, Wonogiri	8 Lap.	90.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Rekapitulasi Data Piutang Daerah	Kab. Wonogiri	11 Jenis	30.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Rekapitulasi Data Piutang Daerah	Kab, Wonogiri	11 Jenis	30.000.000	
TOTAL					442.706.808.571					442.776.808.571	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tidak menyusun kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Tabel 2.8.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

SKPD : BPKD Kabupaten Wonogiri

No,	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<i>N</i>	<i>I</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>

BAB III

TELAAH DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Sehingga, program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat di implementasikan ke daerah dengan tepatsasaran. Begitu juga dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan sehingga ada Sinergi dalam perencanaan pembangunan khususnya di Bidang Keuangan Daerah.

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Kementerian Keuangan juga memperhatikan situasi, kondisi dan dampak global yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat dampak wabah Covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun kedepan, Renstra Kementerian Keuangan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Respons tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya *recovery* perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan

- c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi program), Kementerian Keuangan menjalankan 5 (lima) Program yang telah pula dilengkapi dengan sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

1. Program Kebijakan Fiskal
Sasaran Program (Outcome): Kebijakan fiskal yang ekspansif Konsolidatif
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara
Sasaran Program (Outcome): Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal
3. Program Pengelolaan Belanja Negara
Sasaran Program (Outcome): Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
Sasaran Program (Outcome) 1:
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanjapemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel
Sasaran Program (Outcome) 2:
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif sertamemberi manfaat finansial,
Sasaran Program (Outcome) 3:
Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali
5. Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program (Outcome) 1:
Organisasi dan SDM yang Optimal

Sasaran Program (Outcome) 2:

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi,

Sasaran Program (Outcome) 3:

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah,

Sasaran Program (Outcome) 4:

Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal,

Secara tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Program yang selaras dengan uraian Rencana Strategis Kementerian Keuangan adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ kota.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keruangan Daerah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan akan mendukung pencapaian sasaran dan program yang ada pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran strategis dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran BPKD Kabupaten Wonogiri
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah		Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan dan asset	87%
			Optimalisasi inventarisasi nilai asset daerah	90%
			Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	12,50%
1.1.		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase ketertiban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	100%
			Persentase ketertiban pengelolaan asset pemerintahan daerah	87%
			Persentase ketertiban pengelolaan pendapatan pemerintahan daerah	85%
2.	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja BPKD		Nilai Kematangan Organisasi	45
2.1.		Meningkatnya Kinerja BPKD	Nilai SAKIP	77,50
			Jumlah Agen Perubahan	2
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81,00
			IKM Perangkat Daerah	82,00
			Jumlah Inovasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Wonogiri di tahun 2023. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah pencapaian Visi dan Misi Bupati Wonogiri sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Renstra Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2021-2026.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melakukan Pemetaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Jumlah Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Tahun 2023 berjumlah 4 Program dan 14 Kegiatan sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 2. Administrasi keuangan perangkat daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum perangkat daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

D. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis ini adalah sebesar Rp442.706.808.571,- (Empat ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Nilai total untuk tiap sumber pendanaan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Wonogiri

SKPD: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02			KEUANGAN				442.706.808.571				460.098.197.143
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	31.773.073.675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	32.153.076.473
5	02	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Wonogiri	100%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
5	02	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi	Kabupaten Wonogiri	100%	16.279.426.834	Dana Transfer		100%	16.359.429.630

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		keuangan daerah yang di susun				Umum-Dana Alokasi Umum			
5	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
5	02 01 2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	610.829.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	595.246.843
5	02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
5	02 01 2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	14.492.817.436	Dana Transfer Umum-Dana		100%	14.808.400.00

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Alokasi Umum				
5	02	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	300.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi keuangan daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	408.714.234.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	426.025.620.670
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang Disahkan Tepat Waktu	Kabupaten Wonogiri	100%	810.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	810.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan	Kabupaten Wonogiri	100%	335.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	335.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		regulasi							
5	02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	Kabupaten Wonogiri	100%	625.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	625.000.000
5	02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Wonogiri	90%	406.844.234.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90%	424.115.620.670
5	02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time	Kabupaten Wonogiri	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	100.000.000
5	02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Kabupaten Wonogiri	90%	1.024.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	90%	724.500.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Umum				
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	1.024.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	724.500.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah	Kabupaten Wonogiri	90%	1.195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	1.195.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kabupaten Wonogiri	100%	1.195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.195.000.s000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 22.000.000
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 13.556.510.695
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 10.000.000
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 422.907.940
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 14.446.200.000
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 207.584.056
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 899.999.798
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 209.996.000
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 544.990.404
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 374.058.770.490
 - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 80.000.000

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 1.061.500.000
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan pagu indikatif Rp. 1.171.997.520

Pada proses penyusunan Renja BPKD Tahun 2023, terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat perbedaan indikator dan target sub kegiatan dengan Renstra sebagai dasar penyusunan Renja.

Kemudian untuk menyesuaikan dengan aturan yang baru tersebut, indikator dan target sub kegiatan yang lama perlu disesuaikan (dimutakhirkan) sebagaimana pada Tabel 4.1 sehingga indikator dan target sub kegiatan di tahun 2023 terdapat perbedaan dengan dokumen Renstra periode 2021-2026 yang telah disusun.

Tabel 4.1.
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 (Pemutakhiran)
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Wonogiri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02		KEUANGAN						406.692.456.903	460.008.197.143				
5	02	01						100%	28.665.202.691			100%	32.103.076.473	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah									
5	02	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100%	22.000.000			100%	15.000.000
					Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun									
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKD	9 Dok.	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		9 Dok.	10.000.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	BPKD	1 Lap.	2.000.000	Dana Transfer Umum-		1 Lap.	5.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				DAU			
5	02	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun		100%	13.556.510.695			100%	16.359.429.630
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	72 Orang/ Bulan	13.554.510.695	Dana Transfer Umum-DAU		72 Orang/ Bulan	16.359.429.630
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BPKD	14 Dok.	1.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		14 Dok.	2.500.000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKD	5 Lap.	1.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5 Lap.	2.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian		100%	10.000.000			100%	25.000.000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPKD	5 Orang	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5 Orang	25.000.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah		100%	422.907.940			100%	595.246.843
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKD	1 Paket	2.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	12.000.000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKD	3 Paket	201.999.440	Dana Transfer Umum-DAU		3 Paket	379.746.843
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPKD	1 Paket	39.996.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	41.500.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	BPKD	1 Paket	107.912.500	Dana Transfer		1 Paket	70.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penggandaan yang Disediakan				Umum-DAU			
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKD	1 Lap.	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Lap.	17.000.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKD	20 Lap.	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		20 Lap.	70.000.000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKD	12 Dok.	1.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 Dok.	5.000.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	14.446.200.000			100%	14.808.400.000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	12 Lap.	100.400.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 Lap.	160.400.000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKD	12 Lap.	13.613.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 Laporan	13.928.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPKD	12 Lap.	732.800.000	Dana Transfer Umum-DAU		12 Laporan	720.000.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100%	207.584.056			100%	300.000.000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPKD	40 Unit	101.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		40 Unit	115.000.000
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPKD	10 Unit	104.088.056	Dana Transfer Umum-DAU		10 Unit	170.000.000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BPKD	3 Unit	2.496.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 Unit	15.000.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan		100%	375.793.756.692			100%	425.985.620.670

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						keuangan daerah							
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi		100%	899.999.798			100%	810.000.000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dok.	50.000.000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dok.	50.000.000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Wonogiri	53 Dok.	24.999.970	Dana Transfer Umum-DAU		53 Dok.	25.000.000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikas	Kab. Wonogiri	53 Dok.	39.999.940	Dana Transfer Umum-DAU		53 Dok.	30.000.000
5	02	02	2.01	05	Kordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab. Wonogiri	53 Dok.	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		53 Dok.	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Wonogiri	53 Dok.	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		53 Dok.	30.000.000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Wonogiri	10 Dok.	289.999.985	Dana Transfer Umum-DAU		10 Dok.	300.000.000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Wonogiri	10 Dok.	289.999.903	Dana Transfer Umum-DAU		10 Dok.	300.000.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi		100%	209.996.000			100%	315.000.000
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Wonogiri	280 Dok.	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		280 Dok.	75.000.000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan	Jumlah Dokumen	Kab.	4	10.000.000	Dana		4	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Wonogiri	Dok.		Transfer Umum-DAU		Dok.	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Wonogiri	57 Dok.	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		57 Dok.	50.000.000
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Wonogiri	4 Dok.	14.996.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 Dok.	15.000.000
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Kab. Wonogiri	24 Lap.	45.000.000	Dana Transfer Umum-		24 Lap.	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				DAU							
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	Kab. Wonogiri	5500 Dok.	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5500 Dok.	115.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						SP2D dengan Instansi Terkait							
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP		100%	544.990.404			100%	605.000.000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Wonogiri	2 Lap.	170.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Lap.	250.000.000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri	2 Dok.	274.998.904	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dok.	275.000.000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen	Kab.	1	9.992.500	Dana		1	10.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Wonogiri	Dok.		Transfer Umum-DAU		Dok.	
5	02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri	175 Orang	69.999.000	Dana Transfer Umum-DAU		175 Orang	70.000.000
5	02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		90%	374.058.770.490			90%	424.155.620.670
5	02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Wonogiri	4 Lap.	347.704.044.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 Lap.	403.151.404.431
5	02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Wonogiri	4 Lap.	19.013.026.490	Dana Transfer Umum-DAU		4 Lap.	10.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri	1 Lap.	7.341.700.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Lap.	11.004.216.139
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat ketersediaan informasi keuangan daerah/ jumlah informasi keuangan daerah yang disajikan secara real time		100%	80.000.000			100%	100.000.000
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Wonogiri	1 Dok.	80.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dok.	100.000.000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah		90%	1.061.500.000			90%	724.500.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan barang milik daerah		90%	1.061.500.000			90%	724.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Wonogiri	2 Dok.	67.500.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dok.	67.500.000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	2 Dok.	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dok.	5.000.000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	2 Lap.	430.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Lap.	400.000.000
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	1 Lap.	300.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Lap.	0
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	1 Lap.	200.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Lap.	200.000.000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	3 Lap.	10.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		3 Lap.	10.000.000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan	Kab. Wonogiri	1 Lap.	20.000.000	Dana Transfer		1 Lap.	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Barang Milik Daerah	Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				Umum-DAU			
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	5 Dok.	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		5 Dok.	5.000.000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Wonogiri	4 Lap.	7.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 Lap.	7.000.000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri	84 Orang	2.000.000	Dana Transfer Umum-DAU		84 Orang	2.000.000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat tertib administrasi pengelolaan pendapatan asli daerah		90%	1.171.997.520			90%	1.195.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah		100%	1.171.997.520			100%	1.195.000.000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	2 Lap.	749.999.550	Dana Transfer Umum-DAU		2 Lap.	850.000.000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	3 Unit	216.999.710	Dana Transfer Umum-DAU		3 Unit	175.000.000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	10 Lap.	49.999.000	Dana Transfer Umum-DAU		10 Lap.	20.000.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	10 Layanan	39.999.880	Dana Transfer Umum-DAU		10 Layanan	30.000.000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Wonogiri	40 Dok.	89.999.630	Dana Transfer Umum-DAU		40 Dok.	90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahunan (Tahun 2023)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Wonogiri	10 Dok.	24.999.750	Dana Transfer Umum-DAU		10 Dok.	30.000.000
					TOTAL				406.692.456.903				460.008.197.143

Sumber : Penetapan RKPD 2023 (Pemutakhiran)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renja-BPKD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renstra-BPKD) Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



MOCH. CHOZINUDDIN HOLIL, S.E., Akt., M.Si.

Pembina

NIP. 19760409 200501 1 006